

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab diatas terkait dengan hasil penelitian tentang keterlibatan etnis dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007. Ada tiga hal pokok yang akandiulas pada bab ini, yaitu terkait dengan pendidikan politik masyarakat, netralitas birokrasi dan lembaga penyelenggara pemilu. Adapun hasil kesimpulan dari judul penelitian **“Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada Maluku Utara Tahun 2007”** adalah sebagai berikut:

Keterlibatan etnis yang terjadi dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007, diantaranya keterlibatan etnis pada tahapan proses persiapan, sosialisasi, pendaftaran, kampanye, pencoblosan, dan rekapitulasi suara. Dalam keterlibatan tersebut memperlihatkan kurangnya pendidikan politik dari masyarakat yang tergabung dalam masing-masing kelompok etnis, sehingga sangat mudah dimobilisasi dan mau dijadikan sebagai objek untuk pencapaian keinginan dan kekuasaan oleh elit politik lokal. Keterlibatan etnis dalam Pilkada tidak terjadi secara langsung sebagai partisipasi masyarakat dalam Pemilu sebagai bagian dari perjalanan demokrasi di aras lokal, namun ada pembentukan melalui sebaran isu-isu etnisitas untuk meraih dukungan dari kelompok etnis itu sendiri.

Peran etnis lebih menentukan dibandingkan peran partai dalam setiap Pilkada di

mobilisasi etnis sampai pada alasan mengapa etnis ikut mendukung adalah sebuah bentuk manipulasi politik yang dilakukan oleh dua kelompok yang saling menghancurkan satu sama lain untuk meraih kekuasaan, baik itu kelompoknya Armayin-Kasuba dan kelompok Gafur-Fabanyo pada Pilkada 2007. Oligarki semacam ini saya sebut sebagai oligarki cultural yang sengaja dibentuk dalam pemerintahan oleh sekelompok orang yang memang pada dasarnya memiliki kesamaan etnis, oligarki semacam ini selalu nampak kepermukaan dengan nama-nama baru ketika ada moment seperti Pilkada di Maluku Utara.

Keterlibatan etnis dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007, baik itu etnis yang terlibat mendukung pasangan calon Armayin-Kasuba ataupun yang mendukung pasangan calon Gafur-Fabanyo merupakan kelompok etnis yang memperlihatkan fanatisme politiknya kepada kedua pasangan calon tersebut. Hal ini diperparah dengan tidak netralnya birokrasi dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, masing-masing birokrat maupun anggota lembaga penyelenggara pemilu dengan dasar kesamaan etnis berani secara terbuka memperlihatkan loyalitasnya terhadap pasangan calon masing-masing hanya demi untuk mendapatkan posisi strategis ketika pasangan calon yang mereka dukung menang dalam Pilkada.

Temuan diatas menegaskan bahwa dukungan kelompok etnis Makian, Galela dan Tobelo kepada pasangan calon Armayin-Kasuba adalah manipulasi politik yang sengaja dibentuk oleh kelompok elit pendukung pasangan tersebut, begitu juga dengan dukungan kelompok etnis Tidore, Patani, Weda dan Gebe kepada pasangan calon Gafur-Fabanyo adalah manipulasi politik yang sengaja dibentuk oleh kelompok elit yang mendukung pasangan ini. Temuan berupa mobilisasi serta alasan keterlibatan etnis mempertegas

bahwa tidak secara langsung etnis memberikan dukungan kepada masing-masing pasangan calon. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya banyak tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam Pilkada, namun tindakan-tindakan tersebut tidak mendapatkan sanksi karena tidak netralnya penyelenggara pemilu dalam melaksanakan Pilkada.

Ketidaknetralan birokrasi diperlihatkan dengan adanya benturan kelompok yang terjadi didalam birokrasi itu sendiri yang berdasarkan kesamaan etnis, benturan kepentingan itu semakin nampak ketika para birokrat mendapatkan tawaran posisi strategis dibirokrasi ikut mendukung memenangkan pasangan calon baik itu dari Armaiyn-Kasuba Maupun Gafur-Fabanyo sedangkan yang tidak mendukung akan dimutasikan ketempat-tempat terpencil, dari sini kemudian mulailah apa yang dinamakan dengan perjuangan cultural dibirokrasi untuk menangkan pasangan calon yang mereka dukung. Hal ini juga yang memperparah situasi di luar birokrasi, di mana mulai meluasnya isu-isu dan kampanye hitam terkait dengan etnisitas yang tidak lain dalangnya adalah birokrat itu sendiri, dengan melihat kurangnya pendidikan politik masyarakat mereka melakukan mobilisasi dengan mengatasnamakan etnis untuk mendukung pasangan calon yang mereka dukung yang sebenarnya mereka sudah ada tawar-menawar kepentingan sebelumnya, oleh karena itu, masyarakat hanya dijadikan objek pemenuhan keinginan mereka yang sarat dengan kepentingan masing-masing.

## **B. Saran**

Demi terwujudnya demokratisasi di aras lokal maka perlunya peningkatan pendidikan politik dan kebebasan masyarakat agar dapat menghentikan tumbuhnya

oligarki di daerah. Hal ini juga akan berdampak baik buat pelaksanaan Pilkada Maluku

Utara yang selama pelaksanaannya pada tahun 2002 dan tahun 2007 selalu melenceng dari sejatinya demokrasi yang diinginkan. Agar kedepannya tidak terjadi lagi hal semacam ini dalam Pilkada Maluku Utara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Fungsi Partai Politik harus dikedepankan lagi seperti memberikan pendidikan politik, sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan lain sebagainya.

b. Fungsi Ormas dan Akademisi sebagai kelompok pengontrol jalannya pelaksanaan Pilkada harus lebih meningkatkan pengawasan sehingga kemungkinan adanya pelanggaran dapat diatasi.

c. Tugas dan fungsi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti Panwas dan KPUD dalam Pilkada harus lebih independen, bertanggung jawab dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan (netral) sehingga setiap pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada dapat secara langsung diusut sampai tuntas.